

## **LATAR BELAKANG**

Penelitian ini akan lebih terfokus pada aktor politik yang berperan dalam dinamika politik lokal atau dalam hal ini politik lokal desa Saring Sungai Binjai kecamatan Kusan Hilir kabupaten Tanah Bumbu. Secara umum, aktor politik yang dimaksudkan adalah masyarakat yang terlibat dan mempengaruhi adanya keputusan, kebijakan, atau permufakatan yang diraih melalui musyawarah desa sampai dengan pemilihan perangkat desa terkait. Sedangkan Brian McNair dalam (Nugraheni, 2017) mengatakan bahwa aktor politik yakni individu-individu yang memiliki harapan besar atas sebuah institusi atau organisasi dan memiliki keinginan untuk mempengaruhi adanya pengambilan keputusan kebijakan.

Fokus terhadap dinamika politik lokal desa ini dimaknai sebagai proses belangsungnya politik dari satu aktor ke aktor lain dan dari waktu ke waktu lainnya. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, masyarakat berperan dalam mempengaruhi adanya keputusan kebijakan sebagai aktor politik. Namun, secara khusus penelitian ini dimaksudkan pada pemerintahan desa sebagai institusi atau sebuah organisasi. Dengan menyambung pernyataan Brian McNair, masyarakat jalan memiliki cita-cita luhur yang digantungkan kepada pemerintahan desa sebagai tonggak pengambilan kebijakan serta sebagai aktor dalam mengimplementasikan kebijakan.

Desa Saring Sungai Binjai terletak di kecamatan Kusan Hilir kabupaten Tanah Bumbu. Desa ini mempunyai tipologi daerah yang didominasi oleh wilayah perkebunan, perikanan, persawahan, peternakan, serta aliran sungai yang dinamakan sungai kusan mengalir yang membatasi wilayah desa ini dengan desa lainnya, yakni: a) Di sebelah utara: Sardangan, Paktellu, Saring Sungai Bubu. b) Di sebelah: Pulau Tanjung Satiung. c) Di sebelah timur: Batarang, Mekar Jaya. d) Dan di sebelah selatan: Barugelang, Beringin. Desa ini memiliki luas wilayah sebesar 2.930 ha/m<sup>2</sup> .

Latar belakang menarik yang dimiliki desa Saring Sungai Binjai yaitu dinamika politik lokalnya. Menurut (Tomoning, 2015) dinamika politik lokal mengartikan bahwa adanya interaksi politik yang berkembang dan melahirkan tuntutan politik dari masyarakat kepada pemerintah pusat agar terjadinya perubahan peraturan dan layanan pemerintah terhadap

masyarakat daerah serta pemerintah daerah. Dalam perihal ini, desa diakui secara absah eksistensinya sebagai turunan dari pemerintah daerah di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya. Secara eksplisit pada poin kedua BAB I pasal 1 UU No.6 Tahun 2014 ini menyebutkan bahwa: “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (dpr.go.id, 2014)

Dinamika politik lokal di desa Saring Sungai Binjai lebih mempunyai daya eksotis jika dilihat dari perspektif perangkat desa sebagai aktor politik yang mempengaruhi dinamika politik lokal. Perangkat desa yang dimaksud lebih dominan kepada kepala desa sebagai kepala pemerintahan lokal. Poin lanjutan atau poin ketiga BAB I pasal 1 UU No. 6 Tahun 2014 di atas berbunyi: “Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.” (dpr.go.id, 2014). Daya Tarik yang dimaksud yaitu pada pergantian pemerintah desa Saring Sungai Binjai mengindikasikan adanya politik dinasti.

Politik dinasti menurut (Halim, 2014) yaitu kekuasaan politik yang dijalankan oleh sebuah kelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga atau tren politik kekerabatan yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis atau garis keturunan. Jika dilihat dari garis keturunan, regenerasi kepala desa Saring Sungai Binjai sebagai kepala pemerintahan dijalankan oleh sebuah kelompok keluarga. Hal tersebut diketahui oleh peneliti dalam pra-penelitian yang didapatkan melalui wawancara langsung dengan seorang narasumber yaitu Anafson Hadi selaku kepala desa yang sedang menjabat di periode 2017-2023.

Indikasi politik dinasti di desa Saring Sungai Binjai diperkuat oleh pernyataan narasumber tersebut yang menuturkan ceritanya di balai desa Saring Sungai Binjai pada tanggal 12 Juli 2020. Peneliti mendapatkan informasi dari narasumber bahwa kepemimpinan kepala desa Saring Sungai Binjai masih berlangsung sampai sekarang. Narasumber mengakui adanya garis keturunan yang dimilikinya dengan kepala desa yang sebelumnya telah memangku jabatan.

Narasumber selaku kepala desa sudah menjabat di periode kedua dalam kepemimpinannya. Tuturnya, Ia sempat menjabat sebagai kepala desa di periode 2007-2012. Namun pada Tahun 2009, kepala desa yang akrab disapa Ambo Lau ini memilih untuk turun dari jabatannya sebelum jatuh tempo perodesasi sebab ada tawaran atau pilihan dari Bupati saat itu kepada kepala desa di Tanah Bumbu untuk memilih tetap menjadi kepala desa ataukah memilih menjadi Pegawai Negeri Sipil (sebutan ASN saat itu) dengan syarat meninggalkan jabatan kepala desa. Tuter lanjutan narasumber, beliau lebih memilih untuk menjadi Aperatur Sipil Negara dengan beberapa kepala desa lainnya yang juga memilih status ASN.

**Gambar 1.1 Profil Kepala Desa**



**Gambar 1.2 Kegiatan Desa**



*Sumber: Arsip dokumentasi Desa Saring Sungai Binjai*

Selepas turunnya Anafson Hadi sebagai kepala desa Saring Sungai Binjai sebelum jatuh tempo perodesasi, maka diadakan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di beberapa desa yang mengalami dinamika politik yang sama seperti desa Saring Sungai Binjai. Dalam hasil pilkades Saring Sungai Binjai pada tahun 2010 maka kepemimpinan dialihkan kepada kepala desa terpilih, yaitu Isnaini sebagai kepala desa perempuan yang berstatus sebagai istri dari H. Anafson Hadi dan menunjuk suaminya menjadi sekretaris desa saat periode kepemimpinan kades perempuan satu ini. Secara singkat, enam tahun masa jabatan Isnaini pada periode 2010-2016 telah habis, kemudian pada Pilkades selanjutnya terpilih kembali Anafson Hadi sebagai kepala desa periode 2017-2023. Anafson Hadi pada Pilkades 2017 menjadi kandidat calon kades melawan Munawir yang berstatus ponakan sebagai lawan politiknya saat itu, sebab ketiadaan calon politik penyanding yang muncul dari masyarakat

desa selain Anafson Hadi, dan hal tersebut menjadikan alasan dalam pengangkatan ponakannya sebagai lawan bayangannya.

**Gambar 1.3** Pencabutan Nomor Urut

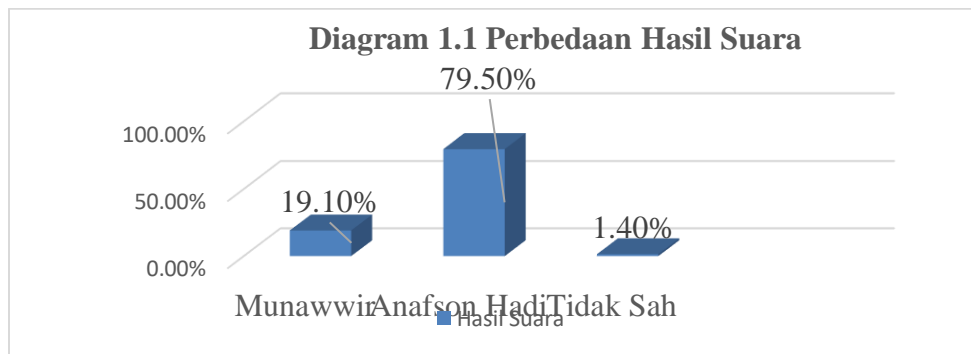


**Gambar 1.4** Rekapitulasi Suara

The table is titled 'REKAPITULASI PERHITUNGAN SUARA' and 'PEMILIHAN CALON KEPALA DESA SARING SUNGAI BINJAI KECAMATAN KUSAN HILIR KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2017'. It lists candidates and their respective vote counts across various sub-districts.

No Urut	Nama Calon	Sub-district	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Jumlah Suara
1	MUNAWAIR	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	59
2	ANAFSON HADI	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	76
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	78
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	72
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	75
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	22
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	537
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11
		...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11

*Sumber: Arsip dokumentasi Desa Saring Sungai Binjai*



Bukan hanya itu saja dinamika regenerasi kepemimpinan di desa ini, masih ada beberapa periode sebelum Anafson Hadi berkecimpung di dunia politik lokal Saring Sungai Binjai. Termasuk kakak kandungnya, ayahnya, pamannya, dan garis keturunan lainnya pernah menjabat sebagai kepala desa Saring Sungai Binjai. Untuk memperkuat latar belakang dinamika politik desa telah dipengaruhi adanya politik dinasti, peneliti mengutip dari (Hermansyah, 2017) politik dinasti merupakan sebuah strategi politik dalam mempertahankan kekuasaan agar kekuasaan tersebut tetap berada di pihak satu kelompok keluarga dengan cara mewariskan kekuasaan kepada orang lain yang memiliki hubungan kekeluargaan.

Menurut data sejarah pemerintahan desa yang terlampir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), terhitung 10 kepala desa yang pernah menjabat di Desa Saring Sungai Binjai sampai pada periode Anafson Hadi. Berikut pohon turunan dari sejarah pemerintahan tersebut

**Tabel 1.1 Sejarah Pemerintah Desa**

<b>No</b>	<b>Periode</b>	<b>Nama Kepala Desa</b>	<b>Keterangan</b>
1	1894 – 1930	<b>DATO HEMMA</b>	Kepala Desa Pertama
2	1930 – 1931	<b>DATO WERE</b>	Kepala Desa
3	1931 – 1936	<b>DATO HEMMA</b>	Kepala Desa
4	1936 – 1952	<b>M. AKIL</b>	Kepala Desa
5	1952 – 1956	<b>H ABD MAJID (P. JIKE )</b>	Kepala Desa
6	1956 – 1958	<b>MUCH . GAUS</b>	Kepala Desa
7	1958 – 1962	<b>H. ABD MUBIN</b>	Kepala Desa
8	1962 – 1984	<b>H. AMBO CINNAH</b>	Kepala Desa
9	1984 – 2007	<b>HJ. MAS' ADAH</b>	Kepala Desa
10	2007 – 2010	<b>H. ANAFSON HADI</b>	Kepala Desa
11	2010 – 2017	<b>HJ. ISNAINI</b>	Kepala Desa
12	2017 – 2023	<b>H. ANAFSON HADI</b>	Kepala Desa

*Sumber: RPJMDes Saring Sungai Binjai 2017-2023*

Pada awal pemerintahan Desa Saring Sungai Binjai, Ahmad atau dikenal dengan sebutan Dato Hemma menjadi kepala pemerintahan yang pertama selama 36 tahun kepemimpinan saat Saring Sungai Binjai masih menerapkan nomenklatur “Kampung”. Setelah kepemimpinan Dato Hemma, ditunjuklah Dato Were sebagai penggantinya selama kurang lebih 2 Tahun masa kepemimpinan yang setelahnya diambil kembali posisi tersebut oleh Dato Hemma di periode kedua kepemimpinannya pada tahun 1931-1936. Dato Were merupakan sepupu dekat dari Dato Hemma, sebab ayah dari Dato Hemma dan ibu dari Dato Were merupakan saudara kandung.



Pada teori patron-klien dari (Scott j. , 1972) yang dikutip dalam jurnal (Bimantara, 2018) patron berperan sebagai pemimpin untuk para klien untuk memberikan bantuan serta perlindungan. Sifat hubungan dengan klien saat tatap muka menunjukkan bahwa hubungan itu mencakup karakter pribadi patron. kelancaran hubungan timbal balik di antara patron-klien akan menimbulkan simpati (kekeluargaan) yang mengarah pada inti kepercayaan di masyarakat. Menurut Scoott, hubungan patron-klien dibagi menjadi dua, yaitu afektif yang terikat karena kedekatan secara emosional antara kedua belah pihak dan instrumental yang terikat karena adanya hadiah berupa jasa atau bentuk materi. (Prasetijo, 2008)

Peneliti perlu mengaitkan teori ini dengan sistem pergantian kepala desa di Saring Sungai Binjai. Dari periode kepemimpinan pertama, yaitu Ahmad alias Dato Hemma, sampai dengan periode kepemimpinan H. Abdul Mubin sistem pergantian kepemimpinan berlaku secara penunjukan oleh kepala desa yang berkuasa sebelumnya, sebab pada saat itu belum ada sistem Pilkades atau pemilihan secara langsung oleh masyarakat desa. Dimulainya pemilihan langsung oleh masyarakat yaitu pada saat pencalonan H. Ambo Cinnah sebagai kepala desa Saring Sungai Binjai, hingga sampai saat ini sistem peralihan kepemimpinan secara absah mewajibkan Pemilihan Kepala Desa secara langsung.

Namun, politik dinasti tidak serta merta berkonotasi negatif. Sebab, pasca 1998 sampai sekarang usaha demokratisasi terus digalakkan melalui berbagai usaha, seperti dalam praktik politik elektoral. Regenerasi kepemimpinan kepala daerah tentu dilakukan dengan pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah tingkat desa atau Pilkades. Sederhanya, masyarakat berhak menentukan kepala desa sesuai yang mereka inginkan, dan tidak ada tata cara penunjukan secara langsung untuk jabatan kepala desa. Maka dari itu, setiap calon kepala desa berhak menunjukkan modal yang dimiliki agar dilirik oleh masyarakat dalam Pilkades.

Jika mengacu pada Piere Boudieu tentang teori modal yang bersinggungan dengan dominasi dan kekuasaan, maka politik dinasti di desa Saring Sungai Binjai lebih cocok dikategorikan ke dalam penggunaan modal kultural. Seperti yang dikutip dari (Halim A. , 2014) modal kultural merupakan kemampuan secara intelektual dan menampilkan diri di depan publik dan menjalin relasi yang didapatkan melalui proses pendidikan formal atau warisan keluarga yang diturunkan. Jika mengacu pada pendapat Halim tersebut, beberapa kepala desa Saring Sungai Binjai yang pernah atau sedang menjabat mendapatkan

intelektualitas dan kemampuan menjalin relasi lebih berorientasi dari bentuk turunan keluarga. Sebab jika dilihat dari pendidikan formal, para kepala desa tersebut memiliki trayek pendidikan formal hampir setara dengan masyarakat umumnya di desa, atau hampir tidak ada kekhususan dalam trayek pendidikan formal. Oleh itu sebabnya, modal kultural yang didapatkan hanya sebatas pengamatan personal serta transfer ilmu secara informal dari kerabat terdekat.

Selain memiliki modal kultural melalui keluarga, Anafson Hadi dan Isnaini cenderung juga memiliki modal sosial di masyarakat. Seperti halnya kepemimpinan lain, pasangan suami istri yang pernah atau sedang menjabat sebagai kepala desa ini menorehkan sedikit banyaknya prestasi desa di bawah kepemimpinannya. Sebagai contoh pernyataan yang diberikan dari narasumber, desa Saring Sungai Binjai mendapatkan juara pertama dalam lomba penyusunan arsip kelengkapan administrasi desa di tingkat kecamatan Kusan Hilir pada tahun dan menjadi perwakilan kecamatan di tingkat kabupaten dan mendapatkan juara kedua. Saring Sungai Binjai juga menjadi salah satu desa sebagai produsen hasil padi terbesar di kabupaten Tanah Bumbu, sesuai kutipan dari berita (Metro7.co.id, Panen Padi di Hadiri Wabup, Padi Saring Sungai Binjai Sukses di Panen, 2016) panen raya petani desa Saring Sungai Binjai pada tahun 2016 seluas 600 Hektare dihadiri oleh wakil bupati Tanah Bumbu, Kodim Tanbu, BP4K Tanbu, serta kepala desa Saring Sungai Binjai.

Selain di bidang kearsipan dan kelengkapan administrasi desa, torehan prestasi Saring Sungai Binjai juga mecolok pada bidang pemberdayaan perempuan. Dengan bermodalkan pendekatan kultural sebagai kepala desa perempuan, Isnaini menggalang partisipasi masyarakat perempuan di desa untuk turut aktif dalam kegiatan desa. Prestasi tersebut dapat dilihat dalam berita (Tribunnews.com, Demi Lomba Ini, Diskominfo Bina kepada Desa Saring Sungai Binjai, 2017) Desa Saring Sungai Binjai mewakili Kabupaten Tanah bumbu dan berlomba ditingkat Provinsi dalam lomba Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS) dan Kecamatan Sayang Ibu (KSI). Selain itu, kepala desa perempuan ini juga menggalang partisipasi masyarakat perempuan dalam ikut berbagai pelatihan untuk ketahanan pangan masyarakat. Seperti kutipan berita (Mc.tanahbumbukab.go.id, 2017) Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Tanah Bumbu memberikan pelatihan kelompok usaha bagi perempuan yang dilaksanakan di desa Saring Sungai Binjai, kecamatan Kusan Hilir.



Demikian hal yang melatarbelakangi dipilihnya judul “Dinamika Politik Lokal Di Desa Saring Sungai Binjai Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu”. Sedikit dari banyaknya dinamika sudah dipaparkan di latarbelakang sebagai hasil data yang didapatkan dari pra-penelitian. Namun data lebih lanjut dan komprehensif akan dicari dan diteliti lebih dalam pada penelitian selanjutnya dan dipaparkan pada hasil temuan data pada Bab selanjutnya.

## **RUMUSAN MASALAH**

Di balik adanya indikasi politik dinasti yang dibarengi dengan adanya modal sosial sebagai modal utama aktor politik Desa Saring Sungai Binjai, maka peneliti tertarik untuk mengajukan rumusan masalah:

- 1. Bagaimana Dinasti Politik Keluarga Anafson Hadi di Desa Saring Sungai Binjai Bertahan?**

## **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dinasti politik Anafson Hadi beserta rantai kepemimpinan sebelumnya di desa saring sungai binjai kecamatan kusan hilir kabupaten tanah bumbu dan untuk mengetahui dampak dari terciptanya dinasti politik lokal tersebut.

## **MANFAAT PENELITIAN**

Terdapat dua manfaat yang dikategorikan dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Manfaat Teoritis**

Adanya penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan metode keilmuan pada bidang politik lokal agar dapat merumuskan pemikiran-pemikiran yang bersifat teoritis sebagai acuan penelitian lainnya.

## **2. Manfaat Praktis**

Adanya penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan saran dan acuan bagi desa Saring Sungai Binjai dan desa lainnya dalam menyelenggarakan pemerintahan desa dengan sebaik-baiknya serta menjadi referensi bagi calon kepala desa selanjutnya.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pada penelitian ini, peneliti mengambil beberapa referensi yang berkaitan dengan dinasti politik dan politik lokal, serta mengembangkannya kembali berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Pada paragraf berikutnya akan diuraikan penelitian terdahulu tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Pahrudin, 2018) Adanya jaringan kekuasaan yang dibangun oleh Dinasti Patjiddai dari awal hingga sekarang berlandaskan atas dasar kekerabatan dan rasa persatuan yang dibangun oleh keluarga Patjiddai di dalam proses berdirinya Desa Katumbangan yang semakin maju serta tercipta rasa persatuan di antara masyarakat Katumbanga. Meskipun kepemimpinan pemerintah desa Katumbangan berlangsung secara turun temurun pada keluarga patjiddai, pemilihan kepemimpinan tetap dipilih secara demokratis pemilihan kepala desa keluarga Patjiddai dilakukan secara langsung, bebas dan adil, serta dilakukan secara demokratis.

Sedangkan penelitian oleh (Tristana, 2017) Dinasti politik memang terjadi di Desa Kancilan, terlihat dari proses pembinaan regenerasi kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu dalam memperoleh atau mempertahankan kekuasaan. Kekuasaan politik atau aktor politik diwariskan dari generasi ke generasi, atau dilakukan oleh salah satu keluarga atau kerabat dekat. Dinasti politik di Desa Kancilan bersumber dari elit desa yang bertujuan untuk mendapatkan suara jauh sebelum Pilkades direncanakan, seperti membangun hubungan kekerabatan yang baik, dan kemudian aktif dalam kegiatan gotong royong. Artinya, sebelum diadakannya Pilkades, terjadi pertukaran pendekatan antara patronase dan pemilih yang memberikan suara, dan tidak serta merta memperoleh elektabilitas secara instan untuk membentuk politik dinasti Desa Kancilan.

Dinasti politik lokal desa di kecamatan Wihitama kabupaten Flores Timur menurut penelitian (Tokan & Ola, 2019) dipengaruhi adanya relasi kuasa antara elit tradisional desa

dan kepala desa yang seharusnya melakukan fungsi koordinasi dan BPD melaksanakan check and balances, namun hanya menjadi sebuah bentuk formalitas agar kekuasaan dipertahankan untuk segelintir kelompok kepentingan, termasuk elit tradisional desa yang secara sembunyi-sembunyi memenangkan calon kepala desa tertentu pada pelaksanaan pemilihan kepala desa. Hal ini mengakibatkan makin melemahkan kapasitas warga dalam mengontrol jalannya pemerintahan dan pembangunan desa. Kemudian, relasi kuasa juga berpengaruh buruk dalam kedudukan BPD yang seharusnya bertindak sebagai representasi politik warga desa yang pada tiap wilayah dusun dan RT yang diharapkan dapat merepresentasikan kepentingan masyarakat malah terjadi sebaliknya yaitu akumulasi kepentingan dari bias kepentingan elit desa.

Pada penelitian (Hermansyah, 2017) mengemukakan bahwa berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan dalam persepsi publik tentang politik dinasti keluarga kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk bisa membangun hubungan yang erat dengan masyarakat dan berpengaruh dalam pemilihan, termasuk visibilitas pribadi dan calon penerus, serta kinerja para pemimpin sebelumnya. Selanjutnya, pengetahuan masyarakat tentang politik dinasti meliputi penerapan kepemimpinan turun-temurun, politik dinasti sebagai strategi politik untuk mempertahankan kepemimpinan dalam satu kelompok kepentingan, dan politik dinasti sebagai trend politik, serta pendapat bahwa politik dinasti tidak dilarang di Indonesia. Dan kemudian perihal kesadaran masyarakat tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya politik dinasti meliputi penyalahgunaan kekuasaan, ketiadaan peluang untuk pemimpin baru yang andal-berkualitas, serta nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang sulit terwujud.

Penelitian selanjutnya yakni dari (Iwansyah, Sunito, & Sjaf, 2016) tentang terbentuknya dinasti politik dari pengaruh eksistensi “Jaro” atau yang dimaknakan sebagai “Jawara” di desa Cileuksa kecamatan Sukajaya kabupaten Bogor yang berekspansi dari beberapa akumulasi arena modal ke dalam arena politik desa dengan memanfaatkan otoritas formal atau dalam hal ini adalah perangkat desa. Dengan berbekal modal sosial seperti jaringan kerabat yang terdistribusikan ke dalam kelompok sosial lain, modal ekonomi seperti kepemilikan aset perusahaan pertambangan, dan modal budaya kultural seperti prestasi kejawaraan dengan mengelola instrument kekerasan, Jaro berkuasa penuh atas kepentingannya di atas kepentingan masyarakat biasa di desanya.

Entitas dinasti politik lokal desa tidak serta merta tentang berhasilnya elit desa dalam membangun politik dinasti, namun adapun penelitian dari (Hidayat, Prasetyo, & Yuwana, 2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri” ini merupakan salah satu contoh ketidakberhasilan elit politik membangun dinasti politik dan mempertahankan relasi kekuasaan yang selama ini dibangun di desa Tanjung kabupaten Kediri. Sedangkan kemenangan didapatkan dari calon kepala desa yang notabene hanya memiliki sedikit modal ekonomi untuk pemenangannya, namun kades terpilih ini termasuk sosok yang memiliki ikatan kuat atas nilai-nilai Jawa selain juga memiliki trah kepemimpinan yang dulu pernah dikuasai kelompok keluarganya. Jadi, kekuasaan oligarki dalam konstelasi politik lokal kabupaten ataupun provinsi bisa saja berpengaruh besar atas kemenangan calon, namun dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa keterikatan nilai-nilai kultural di lokal desa lebih besar dampaknya dibanding kontrak politik yang ditawarkan oleh oligarki di desa.

Penelitian dari (Djati W. R., 2014) Terpilihnya H. Asip Kholbihi SH. , M.Si dan Ir. J. Arini Harimurti menggugah kesadaran berdirinya dinasti politik di masyarakat Desa Bengalsari pada Pilkada Kalungan Utara 2015. Indikasi ini dapat diidentifikasi dengan beberapa indikator. Pertama, pengetahuan tentang pemilu terkait dengan nama calon, visi misi, dan pendukungnya. Kedua, pengertian dinasti politik dipahami sebagai kekuatan yang masih memiliki kaitan kekeluargaan. Ketiga, pengaruh dinasti politik terkait dengan menurunnya kepercayaan publik karena rawan penyalahgunaan. Keempat, pemilih cenderung memilih calon yang memiliki sifat dan sikap yang baik, rencana kerja yang baik, kesamaan ideologi, dan pengalaman pemerintahan. Kelima, elit politik memiliki posisi penting di semua bidang kehidupan dan berkepentingan untuk mengontrol kekuasaan. Keenam, manfaat menggunakan jejaring sosial untuk mendapatkan dukungan kepada kandidat.

Dinasti politik nyatanya masih terjadi di dalam sistem demokrasi Indonesia, seperti penelitian dari (Mawardani, 2019) Dalam mempertahankan kekuasaan, beberapa penguasa menggunakan pemasaran politik untuk menarik perhatian masyarakat. Dengan menggunakan kombinasi teori bauran pemasaran 5P. teori bauran 5P mempertahankan eksistensi Dinasti Purnomo dalam kemenangan sangat menarik. Karena kombinasi teoritis

yang digunakan adalah strategi 5P yaitu product, promotion, price, packaging dan place. Tim yang sukses dapat menarik minat komunitas untuk terus memilih dan mempertahankan posisi Dinasti Punomo. Dinasti Purnomo memimpin Desa Mlakah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa Mlakah dengan visi dan misi untuk mencapai keunggulan dan kemajuan. Tiga periode tersebut bukanlah waktu yang singkat.

Penelitian selanjutnya tentang indikasi dinasti politik yakni dari hasil penelitian dari (Ramadhana, 2016) yang menunjukkan bahwa dinasti politik yang diindikasikan terjadi di Gampong Cot Mesjid oleh Yusniar sebagai "Keuchik" tidak bisa dikatakan sebagai dinasti politik. Hal tersebut tidak adanya campur tangan dari pihak Keuchik periode sebelumnya yang tak lain adalah suami dari Keuchik yang terpilih dengan adanya pemilihan Keuchik langsung. Selain itu, tidak ada model dinasti politik di Desa Cot Mesjid, karena di Kampung Kotmeshid pemilihan Yusniar benar-benar Keuchik karena pilihan yang diambil masyarakat melalui proses pemilihan Keuchik. Untuk pemilihan warga desa dalam contoh ini sebagai negara demokrasi, sepenuhnya merupakan kekerabatan dan keakraban antara calon kepala desa pilkades, dan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh Keuchik terpilih, yaitu Yusniar lebih aktif dan dapat disertai tugas.

**Daftar 1.2 Tabel Literatur Review**

<b>PENELITI</b>	<b>JUDUL</b>	<b>HASIL PENELITIAN</b>
(Pahrudin, 2018)	Dinasti Politik Pemerintah Desa di Kabupaten Polewali Mandar	Meskipun kepemimpinan pemerintah desa Katumbangan berlangsung secara turun temurun pada keluarga patjiddai, pemilihan kepemimpinan tetap dipilih secara demokratis pemilihan kepala desa keluarga Patjiddai dilakukan secara langsung, bebas dan adil, serta dilakukan secara demokratis.
(Tristana, 2017)	Dinasti Politik Dalam Pemerintahan Desa di	Dinasti politik di Desa Kancilan bersumber dari elit desa yang

	Desa Kancilan Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara Periode 1989-2017 (Analisis Implikasi Sosial dan Politik)	bertujuan untuk mendapatkan suara jauh sebelum Pilkades direncanakan, seperti membangun hubungan kekerabatan yang baik, dan kemudian aktif dalam kegiatan gotong royong.
(Tokan & Ola, 2019)	Dinamika Politik Desa Studi tentang Relasi Kuasa Elit Desa dan Politik Pilkades di Kecamatan Witihama Kabupaten Flores Timur	Dinasti politik lokal desa di kecamatan Wihitama kabupaten Flores Timur dipengaruhi adanya relasi kuasa antara elit tradisional desa dan kepala desa yang seharusnya melakukan fungsi koordinasi dan BPD melaksanakan check and balances, namun hanya menjadi sebuah bentuk formalitas agar kekuasaan dipertahankan untuk segelintir kelompok kepentingan.
(Hermansyah, 2017)	Persepsi Masyarakat Terhadap Politik Dinasti Kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk	Persepsi publik tentang politik dinasti keluarga kepala Desa Kepuh Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk disebabkan oleh faktor visivilitas pemimpin sebelumnya dan calon penerus, pengetahuan masyarakat tentang politik dinasti, serta dampak negatif yang ditimbulkan adanya politik dinasti.
(Iwansyah, Sunito, & Sjaf, 2016)	Modal Jaro Dalam Arena Politik Lokal: Studi Kasus di Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor.	Terbentuknya dinasti politik dari pengaruh eksistensi “Jaro” atau yang dimaknakan sebagai “Jawara” di desa Cileuksa kecamatan Sukajaya kabupaten Bogor yang berekspansi

		dari beberapa akumulasi arena modal ke dalam arena politik desa dengan memanfaatkan otoritas formal atau dalam hal ini adalah perangkat desa.
(Hidayat, Prasetyo, & Yuwana, 2018)	Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri.	Kades terpilih memiliki ikatan kuat atas nilai-nilai Jawa selain memiliki trah kepemimpinan yang dulu pernah dikuasai keluarganya. Jadi, kekuasaan oligarki dalam konstelasi politik lokal kabupaten ataupun provinsi bisa saja berpengaruh besar atas kemenangan calon, namun keterikatan nilai-nilai kultural di lokal desa lebih besar dampaknya dibanding kontrak politik yang ditawarkan oleh oligarki di desa.
(Djati W. R., 2014)	Persepsi Masyarakat Desa Banjarsari Terhadap Terbentuknya Dinasti Politik Pada Pilkada Kabupaten Pekalongan Tahun 2015	Bupati terpilih menggugah kesadaran berdirinya dinasti politik di masyarakat Desa Bengalsari pada Pilkada Kalungan Utara 2015, sebab: pengetahuan masyarakat tentang calon, tentang dinasti politik beserta dampak buruknya, kesamaan pandangan, posisi strategis elit politik, serta jejaringan sosial media.
(Mawardani, 2019)	Strategi Pemasaran Politisi Lokal Untuk Mempertahankan Politik Dinasti Di Desa Mlakah, Jrengik, Sampang	Dengan menggunakan kombinasi teori bauran pemasaran 5P. teori bauran 5P mempertahankan eksistensi Dinasti Purnomo dalam kemenangan sangat menarik. Karena kombinasi teoritis yang digunakan

		adalah strategi 5P yaitu product, promotion, price, packaging dan place. Tim yang sukses dapat menarik minat komunitas untuk terus memilih dan mempertahankan posisi Dinasti Punomo
(Ramadhana, 2016)	Dinasti Politik Pemerintah Gampong Terhadap Kemenangan Yusniar Pada Pemilihan Keuchik Cot Mesjid	menunjukkan bahwa dinasti politik yang diindikasikan terjadi di Gampong Cot Mesjid oleh Yusniar sebagai "Keuchik" tidak bisa dikatakan sebagai dinasti politik. Hal tersebut tidak adanya campur tangan dari pihak Keuchik periode sebelumnya yang tak lain adalah suami dari Keuchik yang terpilih dengan adanya pemilihan Keuchik secara langsung, bersih, rahasia, jujur dan adil.

Berdasarkan kajian di atas, telah dijelaskan oleh beberapa peneliti terdahulu yang berkaitan dengan dinasti politik lokal beserta dinamikanya masing-masing. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu di atas adalah tentang pendalaman penelitian dari segi keberlangsungan dan keberlanjutan pergantian kepemimpinan dengan menggunakan modal yang dimiliki para elit politik desa. Sedangkan yang akan membedakan penelitian ini dengan terdahulu yakni periode beruntun kepemimpinan atau dinasti politik di desa saring sungai binjai belum pernah terputus dari sisi trah atau keturunan dan masih berlangsung hingga periode tahun penelitian ini dilaksanakan.



## **KERANGKA TEORI**

### **Dinasti Politik**

Menurut (Komar, 2013) Politik Dinasti secara sederhana dapat diartikan sebagai praktek kekuasaan yang di dalamnya struktur kekuasaan pemerintah diberikan atau dicadangkan kepada anggota keluarga (kerabat) sehingga membuat kekuasaan tersebut hanya didistribusikan di antara kerabat atau saudara sedarah. Secara umum, politik dinasti merupakan proses pembinaan regenerasi kekuasaan untuk kepentingan kelompok tertentu guna memperoleh atau mempertahankan kekuasaan pemerintahan. Dinasti politik dapat dijelaskan secara sederhana sebagai sistem kekuasaan politik atau peran politik yang diturunkan dari generasi ke generasi atau oleh salah satu keluarga serta kerabat dekatnya. Praktik inilah yang digunakan oleh keluarga Patjiddai yang menurut (Pahrudin, 2018) sebagai bangsawan yang berkedudukan di desa Katumbangan dan menimbulkan adanya kekuasaan patron-klien antara keluarga Patjiddai dan masyarakat Katumbang, serta berhasil merekrut beberapa pekerja dari masyarakat Katumbangan sebagai buruh tani, sehingga para buruh tersebut akan selalu menjadi Klein dari keluarga Patjiddai.

Kemudian, menurut (Syamsudin, 2007) dinasti politik merupakan dampak pasif dari kebijakan otonomi daerah yang disertai dengan pembajakan bentuk demokrasi dengan menggunakan hubungan inti silsilah keluarga berdasarkan kepentingan pelestarian kekuasaan keluarga. Kemudian ini memicu lingkaran kekeluargaan menjadi kata kunci untuk memahami dinasti politik dalam praktik pemerintahan daerah. Dalam (Tristana, 2017) menyebutkan adanya implikasi dalam dinasti politik di desa kancilan dari sisi positif dan sisi negatif yang dihasilkan. Dari sisi positif adanya dinasti politik di Desa Kancilan menurut Tristana yakni mudahnya pemerintah desa berkomunikasi dengan elit untuk memajukan desa dan dinasti politik menciptakan masyarakat yang aktif dalam mengawas. Sedangkan menurutnya, dampak negatif di balik adanya dinasti politik di Desa Kancilan yakni kurangnya inovasi program yang diterima masyarakat, kemudian adanya kubu-kubu di desa, serta keuntungan cenderung berpihak kepada elit desa.

Menurut (Norris & Lovenduski, *If Only More Candidates Came Forward: Supply-Side Explanation of Candidates Selection in Britain*, 1993) terdapat dua faktor yang

menyebabkan masuknya anggota kekerabatan ke dalam politik yaitu modal politik dan motivasi politik. Menurut Prewitt dalam (Kurtz & Donn, 1989) faktor motivasi berpengaruh sebab orang tua mewarisi kepentingan politiknya kepada anaknya yang kemudian anak tersebut meneruskan kepentingan orangtuanya. Sosialisasi dari orang tua kepada anaknya merupakan salah satu faktor munculnya politik kekerabatan. Selain itu, calon dari keluarga politik biasanya memiliki modal politik yang cukup seperti: pendidikan, jaringan politik, pengalaman, dan sumber keuangan.

Menurut temuan penelitian yang dilakukan oleh Daniel Markham dalam (Smith, 2012) di Jepang menganalisis bahwa variabel eksternal akan memberikan pengaruh terhadap dinasti politik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pemilu yang berfokus pada calon kandidat akan menguntungkan suatu keluarga politik karena calon tersebut berasal dari keluarga politik yang sudah dikenal masyarakat. Menurut (Purwaningsih, Politik Kekerabatan Dalam Politik Lokal Di Sulawesi Selatan Pada Era Reformasi (Studi Tentang Rekrutmen Politik Pada Partai Golkar, Partai Amanat Nasional Dan Partai Demokrat Sulawesi Selatan Tahun 2009), 2015) proses perkembangan politik kekerabatan tidak dilakukan dalam ruang hampa, tetapi dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti aspek budaya dan sejarah yang meliputinya.

Aktor dinasti politik berorientasi pada taktik pemanfaatan budaya politik parokial dari kalangan masyarakat, yang menurut Gabriel Almond pada masyarakat yang memiliki budaya ini tidak mengharapkan apapun dari sistem politik. Gabriel Almond dalam (Wardhanie, 2017) mengatakan bahwa budaya politik parokial merupakan peran politik dengan tingkat spesialisasi partisipasi politik yang sangat rendah, hal ini disebabkan faktor kognisi (misalnya tingkat pendidikan yang relatif rendah). Ciri budaya politik parokial adalah masyarakat yang kurang memiliki harapan untuk perubahan di masa depan melalui politik. Budaya politik ini adalah fenomena umum yang biasa terlihat di internal masyarakat terbelakang. Hal ini telah disinggung dalam penelitian (Tokan & Ola, 2019) bahwasanya politik lokal desa di kecamatan Wihitama kabupaten Flores Timur dihasilkan dari sirkulasi elit desa yang menggunakan taktik bermuatan budaya politik parochial saling menonjolkan kekuatan suku / kultural calon di antara para pendukung dan tim sukses.

Menurut teori (Djati W. R., *Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal*, 2013) dinasti politik sebagai elit tunggal diartikan hanya satu kelompok elit yang menguasai jalannya politik dan pemerintahan. Dinasti politik dalam tipologi elit ini bentuknya prismatic: dinasti politik bertindak sebagai elit memerintah (*governing elite*) yang memiliki hubungan patronase dengan berbagai pihak, utamanya tokoh informal yang memiliki pengaruh sosio-politik maupun sosio-kultural dalam masyarakat (*nongoverning elite*), dan juga masyarakat (*non-elite*). Elit tunggal ini, disebutkan dalam (Iwansyah, Sunito, & Sjaf, 2016) berdampak pada konstelasi politik di tingkat desa maupun kabupaten. Pada tingkat desa, modal jaro sebagai modal budaya dari Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor yang dipelihara dan dikembangkan menjadi bentuk modal lain (modal sosial, ekonomi dan simbolik) dengan menggunakan strategi seperti biologi, pendidikan, ekonomi dan investasi simbolik. Di arena politik yang lebih luas, Jaro memiliki lebih banyak akumulasi modal yang berasal dari berbagai jenis modal pada masyarakat Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor

Istilah dinasti politik sudah sejak lama mengakar, terutama pada sistem kerajaan yang secara absolut kekuasaan diwariskan kepada pemilik trah. Namun sekarang, istilah tersebut sudah menjelma ke dalam sistem demokrasi Indonesia dan sebagiannya disebabkan oleh dampak pasif otonomi daerah. Dinasti politik merupakan kekuasaan politik yang dijalankan oleh sebuah kelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga atau tren politik kekerabatan yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis atau garis keturunanyang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan. (Halim, 2014)

Menurut (Purwaningsih, 2015) setelah Indonesia melaksanakan sistem desentralisasi pada era reformasi yang diikuti dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat, dengan begitu kesempatan politik bagi individu lokal semakin berkembang di Indonesia. Fenomena ini terkait di dalamnya dengan kasus individu atau keluarga tertentu yang mendominasi politik di daerah. Dari sudut pandang sosial masyarakat, menurut (Djati W. R., 2014) perlu dikaji lebih lanjut tentang keputusan pilihan masyarakat dalam Pilkada, yang mungkin menunjukkan

bahwa mereka ingin sosok individu atau salah satu keluarga yang sekarang menempati kembali

Namun, sistem demokrasi di Indonesia setidaknya sudah membatasi kemungkinan adanya dinasti politik sebab beberapa aspek demokrasi yang disebutkan oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tidak memungkinkan adanya istilah dinasti politik sistem kerajaan seperti penunjukan langsung kepemimpinan kepada pewaris trah, kecuali di beberapa daerah yang telah dikhususkan dalam undang-undang. Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI menurut (Rauf, Hidayat, Gismar, & Mulia, 2014) adalah alat ukur penyusun program demokrasi spesifik dan merupakan model pengukuran dengan latar belakang perkembangan sosial politik di Indonesia. Setidaknya di dalam aspek Hak-Hak Politik mengukur tentang memilih dan dipilih. Seluruh rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih dan dipilih sesuai aturan perundang-undangan yang secara spesifik diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (PKPU) Republik Indonesia.

Pada teori patron-klien dari (Scott j. , 1972) yang dikutip dalam jurnal (Bimantara, 2018) patron berperan sebagai pemimpin untuk para klien untuk memberikan bantuan serta perlindungan. Sifat hubungan dengan klien saat tatap muka menunjukkan bahwa hubungan itu mencakup karakter pribadi patron. kelancaran hubungan timbal balik di antara patron-klien akan menimbulkan simpati (kekeluargaan) yang mengarah pada inti kepercayaan di masyarakat. Menurut Scoott, hubungan patron-klien dibagi menjadi dua, yaitu afektif dan instrumental.

Ramadhana mengatakan bahwa kepemimpinan yang dilanjutkan melalui garis trah tidak serta merta disebut sebagai dinasti politik, jika pemilihan pemimpin terpilih tersebut melalui proses pemilihan secara langsung, bersih, rahasia, jujur dan adil. Dalam studi kasusnya pada pemilihan Keuchik atau Kepala Desa di Gampong Cot Mesjid bukan termasuk dinasti politik walaupun Kades terpilih merupakan istri dari Kades sebelumnya namun tidak ada campur tangan yang dilakukan Kades sebelumnya tersebut (Ramadhana, 2016)

Dinamika politik memberikan makna bahwa adanya upaya dari masyarakat yang bersemangat untuk memberikan dorongan politik berupa tuntutan dan dukungan yang berlangsung secara spontan dan silih berganti sesuai ketertarikan masyarakat. (Tomoning, 2015) Sesuai pernyataan Bailusy tentang dinamika politik, ia mengatakan bahwa dinamika politik menggambarkan proses interaksi politik antara supra struktur politik atau lembaga tempat bersemayam para politisi dan penguasa. Infrastruktur politik merupakan ruang politik warga Negara untuk berinteraksi dengan penguasa yang mempunyai kekuasaan politik, sedangkan warga Negara memiliki kedaulatan politik disebut sebagai mahluk politik

Dinamika politik adalah perubahan corak pemerintahan yang didorong melalui adanya gerak sikap perilaku yang dilakukan secara sengaja. Dinamika hadir sebab adanya pergejolan dari kebutuhan internal maupun eksternal sebuah kelompok yang terorganisir dan terbentuk melalui interaksi masyarakat. (Jatmiko, 2010) Dinamika politik menyebabkan suatu institusi politik melakukan terobosan-terobosan politik dalam menjalankan aktivitas politiknya. Salah satunya melalui strategi yang dilakukan partai politik, agar dinamika politik yang ada berupa peluang dan ancaman dari lingkungan internal dan eksternalnya dapat dihadapi dan dijadikan sebagai salah satu bentuk kapasitas dan kapabilitas partai politik tersebut dalam mengelola institusinya menjadi lebih baik.

Menurut (Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, 2008) dinamika politik terkait sekali dengan persoalan partisipasi dan demokrasi. Isu partisipasi sudah lama dibahas, namun tetap saja problematik, salah satu sebabnya karena pemaknaan yang bias penguasa. Ketika partisipasi dimaknai sebagai keikutsertaan dalam menunaikan agenda-agenda pemerintah, maka medium yang disediakan hanyalah birokratis-teknokratis: mekanisme perencanaan dari bawah, penjaringan aspirasi dan sejenisnya.

### **Politik Lokal**

Politik lokal bermakna siasat yang dilakukan oleh pemerintahan provinsi beserta turunan pemerintahannya untuk membenahi urusan pemerintahannya agar dapat diakui secara formal oleh pemerintahan pusat. Upaya mendapatkan pengakuan oleh pemerintah pusat tersebut harus diakomodir dengan adanya strategi agar

kepentingan rakyat di daerah tersampaikan dengan baik. (Tomoning, 2015) Politik Lokal berorientasi pada interaksi politik yang terjadi antara pemerintah di daerah dalam mengembangkan keinginan politik masyarakat, serta lembaga-lembaga politik lokal dalam menuju kesatu kepentingan politik tertentu.

Menurut teori (Agustino, 2010) Politik lokal diartikan sebagai interaksi antar aktor dalam satu wilayah sehingga mencetuskan dinamika politik di dalamnya. Politik lokal dipahami sebagai arena persaingan antara tiga kekuatan besar yaitu:

- 1) Birokrat yang berlatar belakang bangsawan yang berhasil bertahan hidup melewati pelbagai macam rezim sejak periode kolonial;
- 2) Birokrat yang berasal dari masyarakat awam kebanyakan; dan,
- 3) Para *local strongmen*.

Persaingan ini terkadang berwujud aneh karena adakalanya mereka bersekutu, tetapi di lain kesempatan mereka saling memangsa.

Kemudian gagasan tentang bentuk kekuasaan politik lokal menurut Gaventa dalam (Tokan & Ola, 2019) termanifestasi dalam tiga bagian, yakni:

- 1) Kekuasaan yang terlihat (*visible forms of power*) terwujud dalam kekuasaan yang melembaga, yang secara langsung dapat menentukan arah kebijakan politik.
- 2) Kekuatan tak terlihat, (*invisible power*) menjelaskan bahwa orang tak menyadari adanya hak atau sesuatu yang alami dari mereka sebagai bentuk dominasi atas suatu kelompok.
- 3) Kekuasaan tersembunyi (*hidden power*), merupakan kekuasaan yang digunakan oleh kelompok kepentingan untuk mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa.

Menurut (Halim, 2014) politik secara umum bermakna seni mengatur beragam individu yang mempunyai latar belakang berbeda namun mempunyai tujuan mempunyai tujuan-tujuan yang sama, seperti ingin hidup aman, makmur, dan sejahtera. Aturan-aturan yang diciptakan merupakan wujud ikatan politik yang menyatukan berbagai individu dalam mencapai tujuan yang sama. Secara khusus, politik lokal dimaknai Halim sebagai unsur utama politik nasional yang meliputi aspek-aspek politik

di tingkat makro baik teritorial, sosial, maupun administratif, yang mendasari seluruh entitas bangunan politik di tingkat makro.

Berdasarkan pendapat (Tomoning, 2015) politik lokal secara sederhana dapat didefinisikan sebagai semua kegiatan politik yang berada pada proses pembentukan kebijakan daerah, maupun proses pemilihan kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa politik lokal cakupannya berada dibawah nasional. Golongan daerah yang termasuk dalam pengelolaan politik lokal diantaranya kota, kabupaten dan desa. Pada taraf politik lokal, pemerintah nasional tidak dapat ikut campur secara penuh. Hal ini dikarenakan dalam setiap tatanan lokal telah mempunyai peraturan daerah masing-masing.

## **DEFINISI KONSEPTUAL**

Penelitian ini menggunakan dua jenis definisi konseptual berdasarkan pengertiannya, yaitu definisi tentang “Dinasti Politik” dan definisi tentang “Politik Lokal”. Berikut dua definisi konseptual tersebut:

### **-Dinasti Politik**

Dinasti Politik merupakan kekuasaan politik yang dijalankan oleh sebuah kelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga atau tren politik kekerabatan yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis atau garis keturunanyang lain secara timbal balik dan antara anggota dengan kelompok secara keseluruhan

### **-Politik Lokal**

politik lokal merupakan unsur utama politik nasional dalam menciptakan aturan-aturan atas wujud ikatan politik yang meliputi aspek-aspek di tingkat makro baik teritorial, sosial, maupun administratif, yang mendasari seluruh entitas bangunan politik di tingkat makro.

## DEFINISI OPERASIONAL

Teori yang digunakan di definisi operasional ini untuk membedah kasus di bab pembahasan, maka peneliti fokus kepada 3 variabel dalam analisis bertahannya Dinasti Anafson Hadi di desa Saring Sungai Binjai yaitu variabel Kesempatan Politik, variabel pengaruh internal dan variable pengaruh eksternal. Variabel pengaruh internal dijabarkan dalam tiga sub variabel yaitu pendidikan, jaringan politik, pengalaman. Variabel pengaruh eksternal dijabarkan dalam dua sub variabel yakni pengaruh sejarah dan budaya. Dari 3 variabel tersebut, terdapat 3 teori utama yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu teori kesempatan politik Daniel Smith, teori pengaruh internal keluarga politik dari Pippa Norris & Lovenduski, dan teori pengaruh eksternal politik kekerabatan dari Titin Purwaningsih. Dan dalam mendeskripsikan sub variabel di atas, peneliti juga menggunakan teori dari para ahli lainnya.

Variabel	Indikator	Parameter
<b>Kesempatan Politik</b>	politik dinasti berkembang pada era demokratisasi karena adanya desentralisasi dalam sistem pemilu yang berpusat pada kandidat.	-Demokratisasi -Desentralisasi
<b>Pengaruh Internal</b>	faktor yang menyebabkan masuknya anggota kekerabatan ke dalam politik yaitu modal politik dan motivasi politik.	-Pendidikan -Jaringan Politik -Pengalaman
<b>Pengaruh Eksternal</b>	politik kekerabatan tidak dilakukan dalam ruang hampa, tetapi dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti aspek budaya dan sejarah yang meliputinya	-Sejarah -Budaya



## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis penelitian**

Jenis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang mana dimaksud oleh (Herdiansyah, 2010) kualitatif tersebut berdasarkan kepada pemahaman akan sebuah fenomena sosial yang berlangsungnya interaksi antara peneliti dengan objek penelitiannya secara mendalam dan komprehensif. lebih menekankan kepada proses dari pada hasil, hal tersebut disebabkan adanya hubungan dengan bagian-bagian yang sedang diteliti akan lebih jelas apabila diamati dari segi proses. Pendekatan kualitatif menjadi pilihan peneliti untuk mempermudah analisis dinasti politik lokal di desa Saring Sungai Binjai, kecamatan Kusan Hilir, kabupaten Tanah Bumbu dengan pengambilan data berbentuk wawancara.

### **Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis memilih desa Saring Sungai Binjai, kecamatan Kusan Hilir, kabupaten Tanah Bumbu sebagai lokasi penelitian sebab desa ini mempunyai indikasi yang eksotis atau punya daya tarik tersendiri untuk diteliti lewat perspektif dinamika politik lokalnya.

### **Unit Analisa Data**

#### **Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengambilan data langsung kepada informan sebagai sumber informasi. Adapaun contoh data primer yakni data yang diperoleh dalam bentuk hasil wawancara peneliti kepada narasumber, yaitu Anafson Hadi sebagai kepala desa periode 2017-2023 beserta garis trahnya.

#### **Data Sekunder**

Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari kajian-kajian yang telah dilakukan sebelumnya untuk digunakan sebagai pendukung dalam Analisa kasus-kasus yang terjadi sehingga memperkuat studi dalam penelitian ini. Adapun contoh data sekunder dalam penelitian ini meliputi kajian dokumentasi, berita media massa dan kajian-kajian penelitian terdahulu, serta dokumentasi-dokumentasi yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **Teknik Pengumpulan Data**

Data adalah sesuatu yang masih harus diolah kembali. Data dapat berupa huruf, angka, suara, simbol serta keadaan yang biasanya digunakan guna melihat obyek, lingkungan serta kejadian. Teknik pengumpulan data ini pun dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna menggapai tujuan akhir sebuah penelitian. Tujuan yang dipaparkan dalam bentuk hipotesis adalah jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dan studi dokumentasi. Adapun dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara :

### **Wawancara**

Wawancara menjadi penting dalam sebuah penelitian kualitatif karena akan menggali informasi yang di transformasikan dalam bentuk kata-kata. Wawancara merupakan suatu percakapan dengan memiliki tujuan tertentu yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) sebagai penanya dan pihak yang diwawancarai (narasumber) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan. Adapun dalam tahap wawancara, narasumber yang peneliti pilih antara lain sebagai berikut :

1. Anafson Hadi Selaku Kepala Desa Periode 2017-2023
2. Isnaini Selaku Kepala Desa Periode 2010-2016
3. Rizka Purnama Sari Selaku Bendahara Desa
4. Muksinin selaku Tokoh Masyarakat
5. Rukwanuddin selaku Badan Permusyawaratan Desa
6. Pua Imbing Selaku Mantan Kepala Desa Rantau Panjang hilir
7. Darjah selaku Kaur Pembangunan
8. Hardiana selaku Tokoh Masyarakat

### **Studi Dokumentasi**

Selain menggunakan metode wawancara, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu catatan tertulis atau bergambar yang berkaitan dengan sesuatu hal yang telah terjadi, serta merupakan suatu fakta-fakta dan data yang tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk dokumentasi. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara menyelidiki data

seperti dari dokumen-dokumen, catatan seperti jurnal skripsi dan berita, file, atau hal-hal lain yang sudah di dokumentasikan.

### **Teknik Analisis Data**

Menurut (Sugiono, 2010) analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah didapatkan berdasarkan hasil wawancara, catatan, dan dokumentasi. Data terkait dinamika politik lokal didapatkan dari berbagai sumber nantinya akan dianalisis secara mendalam sehingga akan dapat diketahui bagaimana dinasti politik lokal di desa Saring Sungai Binjai, kecamatan Kusan Hilir, kabupaten Tanah Bumbu terjadi. Selanjutnya secara rinci tahapan dalam analisis data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut

#### **Reduksi Data**

Reduksi data merupakan proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan. Reduksi data juga merupakan bagian dari teknis analisis data. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, memilah, dan mengorganisasi data dengan sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Data kualitatif yang didapatkan akan lebih mudah disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi, menggolongkan dalam satu pola yang luas, melalui ringkasan atau uraian singkat, dan sebagainya.

#### **Penyajian data**

Data yang sudah peneliti kumpulkan serta sudah direduksi kemudian akan dijelaskan dengan fenomena yang ada dilapangan. Masing-masing penjelasan mengenai berbagai aspek yang akan diteliti atau ditulis secara terpisah dalam bentuk bab, sehingga nantinya dalam pembahasan akan lebih terfokus dan tidak saling tumpang tindih.

#### **Menarik Kesimpulan**

Menarik kesimpulan merupakan tahapan akhir dalam proses analisis data terhadap pembahasan yang telah dilakukan. Selanjutnya maka hasil dari

pembahasan akan dirinci pada kesimpulan yang berkaitan dengan dinamika politik lokal di desa Saring Sungai Binjai, kecamatan Kusan Hilir, kabupaten Tanah Bumbu. Maka dalam menarik kesimpulan adalah suatu hal akhir yang menjadi tujuan dan *goals* penelitian ini.